



Analisis Dinamika Penetapan UMK: Peran Ekonomi dan Sosial di Sumatera Selatan Periode 2020 – 2024

Haidar Akhmad Al Barabasi

Universitas Diponegoro

Hastarini Dwi Atmanti

Universitas Diponegoro

Alamat : Jl. Prof. Soedarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah
50275

Korespondensi penulis: haidarakhmadalb@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the dynamics of minimum wage determination (UMK) in South Sumatra from 2020 to 2024, emphasizing the role of economic and social indicators. Utilizing panel data regression with the Fixed Effect Model (FEM), the study investigates the influence of open unemployment rate, Human Development Index (HDI), labor force participation rate, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and poverty rate on the determination of district/city minimum wages. The findings reveal that HDI has a positive and significant effect on UMK, indicating that improved human development supports higher wage standards. Conversely, the open unemployment rate and poverty rate negatively and significantly affect UMK, suggesting that socioeconomic vulnerabilities limit local governments' capacity to increase wages. Meanwhile, labor force participation and GRDP are not statistically significant. These results underscore the complexity of wage policy formulation, which must balance worker welfare and economic resilience at the regional level. The study offers relevant policy implications for equitable wage setting through human capital development and poverty reduction strategies.*

Keywords: *Minimum Wage ; Panel Data ; Regional Economy*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dinamika penetapan upah minimum (UMK) di Sumatera Selatan tahun 2020-2024 dengan menitikberatkan pada peran indikator ekonomi dan sosial. Pengolahan data menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM), penelitian ini mengkaji pengaruh tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat partisipasi angkatan kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan tingkat kemiskinan terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMK, yang mengindikasikan bahwa pembangunan manusia yang lebih baik mendukung standar upah yang lebih tinggi. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap UMK, yang mengindikasikan bahwa kerentanan sosial ekonomi membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan upah. Sementara itu, partisipasi angkatan kerja dan PDRB tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menggarisbawahi kompleksitas formulasi kebijakan pengupahan, yang harus menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dan ketahanan ekonomi di tingkat daerah. Penelitian ini menawarkan implikasi kebijakan yang relevan untuk penetapan upah yang adil melalui pengembangan sumber daya manusia dan strategi penanggulangan kemiskinan.

Kata Kunci: *Data Panel ; Ekonomi Regional ; Upah Minimum*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menjelaskan dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara, baik dari sisi fiskal maupun produksi fisik, seperti bertambahnya hasil industri, infrastruktur, jumlah sekolah, sektor jasa, dan produksi barang modal (Sukirno, 2016). Secara umum, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kegiatan ekonomi yang menyebabkan bertambahnya output barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan kemampuan suatu negara untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memberikan lebih banyak barang serta jasa kepada penduduknya.

Received April 28, 2025; Revised Mei 30 2025; Juni 16, 2025

*** Haidar Akhmad Al Barabasi, haidarakhmadalb@gmail.com**

Kemampuan ini sangat tergantung pada kondisi teknis, kelembagaan, dan ideologi yang berlaku (Jhingan, 2012). Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas sektor usaha dan efisiensi produksi yang berdampak pada peningkatan kesempatan kerja (Feriyanto, 2014).

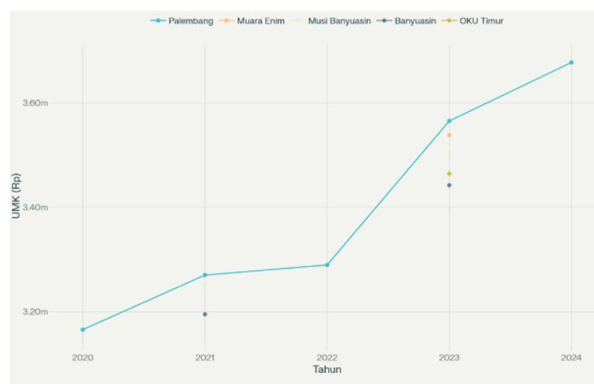
Isu ketenagakerjaan merupakan permasalahan penting di banyak negara, baik maju maupun berkembang (Iswahyudi et al., 2020). Salah satu pendekatan dalam mengatasi masalah ini adalah melalui kebijakan pengupahan. Kebijakan tersebut mencakup penetapan upah minimum yang berfungsi sebagai perlindungan agar upah tidak jatuh terlalu rendah. Hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi serta meningkatkan pendapatan pekerja berupah rendah.

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan instrumen kebijakan ketenagakerjaan yang strategis dalam upaya menjamin kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Damanik & Zalukhu, 2021). Dalam konteks pembangunan daerah, penetapan UMK tidak hanya menjadi mekanisme perlindungan upah bagi pekerja, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial ekonomi suatu wilayah. Di Indonesia, kebijakan upah minimum diatur melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja yang menghadirkan paradigma baru dalam penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan aspek fleksibilitas bagi usaha mikro dan kecil (Fatmala et al., 2023).

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi dengan kompleksitas ekonomi dan sosial yang tinggi menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja, dunia usaha, dan pembangunan daerah melalui kebijakan UMK. Provinsi ini memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga industri manufaktur, yang tersebar di 17 kabupaten/kota dengan kondisi sosial ekonomi yang bervariasi. Penetapan UMK di Sumatera Selatan periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menarik, dengan fenomena berupa disparitas yang signifikan antar kabupaten/kota.

Berdasarkan data terbaru, UMP Sumatera Selatan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.681.571, meningkat 6,5% dari tahun sebelumnya. Namun, terdapat variasi yang signifikan dalam penetapan UMK di tujuh kabupaten/kota yang memiliki Dewan Pengupahan, sementara sepuluh daerah lainnya mengacu pada UMP provinsi. Fenomena yang menarik adalah adanya disparitas UMK yang cukup besar antar wilayah, di mana Kota Palembang konsisten memiliki UMK tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, dan OKU Timur.

Grafik 1. Tren UMK Sumatera Selatan 2020 - 2024



Sumber: BPS (2025)

Grafik di atas menunjukkan tren UMK di beberapa kabupaten/kota utama Sumatera Selatan selama periode 2020-2024. Terlihat bahwa Kota Palembang mengalami pertumbuhan UMK yang

paling konsisten dan tertinggi, mencapai Rp 3.677.591 pada tahun 2024. Fenomena menarik lainnya adalah adanya fluktuasi dalam penetapan UMK di beberapa kabupaten, di mana tidak semua daerah menetapkan UMK setiap tahun, melainkan mengikuti UMP provinsi pada tahun-tahun tertentu.

Data kuantitatif menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2024 mencapai 3,97%, sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 4,14%. Sementara itu, tingkat kemiskinan provinsi berada pada level 11,46% dengan variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota, mulai dari 4,60% di Kota Palembang hingga 13,14% di Musi Rawas Utara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menunjukkan disparitas, dengan target provinsi sebesar 71,63 pada tahun 2024

Sumatera Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar dengan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 yang didominasi oleh Kota Palembang (Rp 215.040,98 miliar), Kabupaten Muara Enim (Rp 132.092,50 miliar), dan Musi Banyuasin (Rp 91.577,16 miliar). Struktur ekonomi provinsi ini didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, serta industri pengolahan. Kondisi geografis yang strategis sebagai pintu gerbang ekonomi Sumatera bagian selatan memberikan keunggulan kompetitif dalam pengembangan ekonomi regional.

Potensi sumber daya manusia di Sumatera Selatan juga cukup besar dengan jumlah penduduk usia kerja yang terus meningkat dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang relatif stabil. Namun, tantangan yang dihadapi adalah adanya ketimpangan kualitas sumber daya manusia antar wilayah, yang tercermin dari disparitas IPM dan tingkat pendidikan (Oktanata, 2022). Hal ini berimplikasi pada perbedaan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan daerah dalam menetapkan UMK (Trimaya, 2014).

Hubungan antara upah minimum dan indikator ekonomi maupun sosial sangat kompleks. Di satu sisi, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan daya beli pekerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, kenaikan upah minimum juga dapat meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang berpotensi menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang padat karya dan memiliki margin keuntungan tipis. Efeknya pun bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi ekonomi makro, struktur pasar tenaga kerja, dan karakteristik sektor usaha di suatu wilayah.

Penelitian (Asmara et al., 2024) menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia (2015–2020) dan menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, penelitian sebelumnya oleh (Pusposari, 2011) dan (Susilowati & Wahyuni, 2019) justru menemukan pengaruh negatif, menunjukkan bahwa hasil penelitian terkait upah minimum sangat dipengaruhi oleh konteks wilayah dan periode waktu penelitian. Melalui simulasi dengan model *Computable General Equilibrium*, penelitian (Maipita, 2013) menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum meningkatkan pendapatan buruh dan menurunkan angka kemiskinan pada kelompok tersebut. Namun, secara makro, kenaikan upah minimum menurunkan kinerja ekonomi, menaikkan harga, menurunkan konsumsi, ekspor, dan output sektoral, serta sedikit meningkatkan jumlah rumah tangga miskin secara keseluruhan. Penelitian (Munarni et al., 2024) di Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa upah minimum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Upah minimum yang lebih tinggi memungkinkan pekerja memenuhi kebutuhan pokok sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, peningkatan upah minimum juga meningkatkan probabilitas pengangguran, yang pada akhirnya bisa menambah jumlah kemiskinan jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik penetapan upah minimum di tingkat regional, khususnya dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan pendekatan analisis panel data dan metode ekonometrika yang tepat, penelitian ini akan menghasilkan temuan yang relevan bagi pengambilan kebijakan ketenagakerjaan di Sumatera Selatan dan daerah lain dengan karakteristik serupa.

KAJIAN TEORI

Teori Upah Minimum (Minimum Wage Theory)

Teori upah minimum menyatakan bahwa penetapan batas bawah upah bertujuan melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan standar hidup layak. Menurut teori ini, upah minimum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja berpenghasilan rendah, namun jika ditetapkan terlalu tinggi, dapat menurunkan permintaan tenaga kerja dan meningkatkan pengangguran (Stigler, 1946). Dalam konteks regional, penetapan UMK harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kemampuan dunia usaha (Jemarut et al., 2023).

Teori Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Berdasarkan teori ini, tingkat upah akan memengaruhi jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja berslope positif, artinya kenaikan upah akan meningkatkan penawaran tenaga kerja, sedangkan kurva permintaan tenaga kerja berslope negatif.

Dalam model pasar tenaga kerja, upah minimum berperan sebagai harga dasar (price floor). Secara matematis, keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi saat:

$$Q_s(W) = Q_d(W)$$

dengan Q_s adalah penawaran tenaga kerja dan Q_d permintaan tenaga kerja pada tingkat upah W . Jika upah minimum (W_{min}) ditetapkan di atas W^* (upah ekuilibrium), maka:

$$Q_s(W_{min}) > Q_d(W_{min})$$

terjadi surplus tenaga kerja (pengangguran).

Teori Teori Neoklasik Regional (Neoclassical Regional Growth Theory)

Teori pertumbuhan ekonomi regional menekankan pentingnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator kapasitas ekonomi daerah. Menurut teori ini, daerah dengan PDRB tinggi memiliki kemampuan fiskal dan ekonomi yang lebih besar untuk menetapkan upah minimum yang lebih tinggi (Richardson, 1978). PDRB juga mencerminkan struktur ekonomi daerah dan sektor-sektor unggulan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan.

Teori Human Capital

Teori human capital (Becker, 1964) peningkatan IPM (pendidikan, kesehatan) meningkatkan produktivitas, yang secara matematis dapat meningkatkan nilai marginal produk tenaga kerja (MPL), sehingga upah (W) juga meningkat:

$$W = MPL \times P$$

dengan P adalah harga output.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kualitas sumber daya manusia sangat relevan dalam penetapan UMK. Daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki pekerja yang lebih produktif, sehingga mampu menyerap upah minimum yang lebih tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada provinsi Sumatera Selatan periode 2020 - 2024, dengan data sekunder. Jenis data yang dibutuhkan adalah Upah Minimum Kab/Kota, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Produk Domestik Regional Bruto serta Presentase Penduduk Miskin. Data tersebut diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Pada penelitian ini, peran indikator ekonomi (seperti Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka,) dan sosial (seperti Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Presentase Penduduk Miskin). Model tersebut selanjutnya dikembangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

$$\log \text{UMK}_{it} = \alpha + \beta_1 \log \text{TPT}_{it} + \beta_2 \log \text{IPM}_{it} + \beta_3 \log \text{TPAK}_{it} + \beta_4 \log \text{PDRB}_{it} + \beta_5 \log \text{PPM}_{it} + \text{U}_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

- UMK = Upah Minimum Kab/Kota
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- PDRB = Produk Domestik Regional Bruto
- PPM = Presentase Penduduk Miskin
- α = Konstanta
- β_1 - β_5 = Koefisien Regresi
- ϵ_{it} = eror
- i = jumlah cross section
- t = Periode waktu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Terbaik Regresi Data Panel

Tabel 2. Hasil Penentuan Regresi Data Panel

1. Chow Test	2. Hausman Test	3. LM Test
H0 : Common Effect Model	H0 : Random Effect Model	H0 : Common Effect Model
H1 : Fixed Effect Model	H1 : Fixed Effect Model	H1 : Random Effect Model
Hasil Uji		
Chow Test	Hausman Test	LM Test
Prob < α (0.05) = 0.000	Prob < α (0.05) = 0.000	TIDAK PERLU DILAKUKAN
Pengambilan Keputusan :		
Menolak H0, Jika Prob < α (0.05) atau sebesar 5%		
Sumber: Data Diolah (2025)		

Berdasarkan Tabel 2, hasil pengujian pemilihan model regresi panel dimulai dengan uji Chow yang bertujuan untuk membandingkan antara model Common Effect dan Fixed Effect. Nilai p-value sebesar 0.000 yang diperoleh dari uji tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antar unit cross-section, sehingga model Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai digunakan dibandingkan model Common Effect. Selanjutnya, untuk menentukan apakah model yang paling tepat antara Fixed Effect Model (FEM) atau Random Effect Model (REM), dilakukan uji Hausman. Uji ini penting karena menguji apakah terdapat korelasi antara efek individual dan variabel independen. Hasil uji Hausman juga menunjukkan nilai p-value sebesar 0.000, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Oleh karena itu, estimasi yang dihasilkan oleh model Random Effect tidak konsisten, dan model Fixed Effect Model (FEM) kembali dinyatakan sebagai model yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis regresi panel pada penelitian ini.

Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 3. Hasil Fixed Effect Model (FEM)

	Coefficient	Std.Error	t-statistic	Prob
Tingkat Pengangguran Terbuka	-0.0028	0.0012	-2.4138	0.0187
Indeks Pembangunan Manusia	0.0148	0.0036	4.0240	0.0002
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0.0008	0.0003	0.2076	0.8362
Produk Domestik Regional Bruto	0.0002	0.0012	0.1720	0.8640
Persentase Penduduk Miskin	-0.0169	0.0070	-2.3767	0.0205

Sumber: Data Diolah (2025)

$$Y = 5.6412 - 0.0028 * X1 + 0.0148 * X2 + 0.0008 * X3 + 0.0002 * X4 - 0.0169 * X5$$

Berdasarkan hasil estimasi model Fixed Effect pada Tabel 3, terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan sangat signifikan (p-value 0,0002), menunjukkan bahwa peningkatan IPM mendorong perbaikan variabel yang diamati. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan (p-value masing-masing 0,0187 dan 0,0205), yang berarti peningkatan dua variabel ini cenderung menurunkan capaian variabel dependen. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan PDRB tidak berpengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya jauh di atas 0,05.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

F-statistic	31.939
Prob (F-statistic)	0,0000

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil Uji F pada Tabel 4, diperoleh nilai F-statistic sebesar 31,939 dengan nilai probabilitas 0,0000. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan layak secara statistik dan semua variabel secara bersama-sama memiliki kontribusi terhadap variasi variabel yang diamati.

Koefisien Determinasi (Uji R Square)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0,9141
Adjusted R-squared	0,8855

Sumber: Data Diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 5, nilai *R-squared* sebesar 0,9141 dan *Adjusted R-squared* sebesar 0,8855 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 91,41% variasi variabel dependen. Artinya, variabel independen yang digunakan dalam model sudah sangat baik dalam menjelaskan perubahan variabel yang diamati, sementara sisanya sebesar 8,59% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Pembahasan

Hipotesis 1: Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap UMK

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMK dengan koefisien sebesar -0.0028 dan nilai probabilitas 0.0187 (< 0.05). Temuan ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif terhadap penetapan UMK di Sumatera Selatan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Atiyatna et al., 2016) yang menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan upah minimum, pengusaha cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja yang mereka gunakan dalam proses produksi, menciptakan trade-off antara tingkat upah dan kesempatan kerja. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan tingkat pengangguran dalam penetapan UMK untuk menghindari dampak kontraproduktif. Penelitian didukung oleh (Susanti, 2019) mengindikasikan bahwa partisipasi angkatan kerja lebih berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja daripada penetapan upah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) karena tingginya angka pengangguran sering kali menjadi indikator tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan upah minimum guna menjaga daya beli masyarakat. Ketika TPT meningkat, hal ini mencerminkan ketimpangan antara ketersediaan dan penyerapan tenaga kerja, yang dapat memperbesar ketimpangan sosial. Dalam konteks ini, penetapan UMK yang lebih tinggi sering dijadikan sebagai instrumen kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong peningkatan kualitas hidup. Selain itu, kenaikan UMK juga dapat berfungsi sebagai sinyal politik dan sosial, bahwa pemerintah daerah peduli terhadap perlindungan tenaga kerja, terutama di wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi. Lebih lanjut, peningkatan UMK dalam kondisi TPT tinggi juga bisa diarahkan untuk mendorong konsumsi rumah tangga sebagai strategi pemulihan ekonomi berbasis permintaan, sehingga menciptakan

efek pengganda (multiplier effect) terhadap lapangan kerja baru. Dengan demikian, meskipun secara teori TPT yang tinggi dapat menurunkan daya tawar buruh, dalam praktik kebijakan daerah, TPT justru dapat mendorong peningkatan UMK sebagai respon atas tekanan sosial dan kebutuhan akan stabilitas ekonomi lokal.

Hipotesis 2: Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap UMK

Hasil analisis menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap UMK dengan koefisien 0.0148 dan nilai probabilitas 0.0002 (< 0.05). Temuan ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap penetapan UMK di Sumatera Selatan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian (Saputri, 2021) di Jawa Barat yang menunjukkan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, namun memiliki hubungan yang erat dengan produktivitas tenaga kerja. Penelitian di Sumatera Selatan juga menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat mendukung penetapan UMK yang lebih tinggi (Putri, 2018). Hubungan positif antara IPM dan UMK dapat dijelaskan melalui mekanisme produktivitas tenaga kerja, di mana peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup memungkinkan pekerja untuk menghasilkan output yang lebih tinggi, sehingga justifikasi untuk upah minimum yang lebih tinggi menjadi lebih kuat. Daerah dengan IPM tinggi cenderung memiliki struktur ekonomi yang lebih maju dan kapasitas fiskal yang lebih baik untuk menetapkan UMK yang kompetitif.

Hipotesis 3: Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap UMK

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki koefisien positif sebesar 0.0008 namun tidak signifikan dengan nilai probabilitas 0.8362 (> 0.05). Temuan ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa TPAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan UMK di Sumatera Selatan.

Ketidaksignifikan pengaruh TPAK terhadap UMK dapat dijelaskan oleh kompleksitas hubungan antara partisipasi angkatan kerja dan kebijakan upah minimum. Penelitian tentang urbanisasi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja (TKK) memiliki pengaruh positif sebesar 0.053250 terhadap urbanisasi, yang mengindikasikan bahwa partisipasi angkatan kerja lebih berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja daripada penetapan upah (Atiyatna et al., 2016).

TPAK yang tinggi tidak selalu mengindikasikan kekuatan tawar yang lebih besar bagi pekerja dalam penetapan upah minimum, karena banyaknya pencari kerja justru dapat menciptakan kompetisi yang menurunkan posisi tawar pekerja. Selain itu, TPAK mencakup baik pekerja formal maupun informal, sementara UMK biasanya lebih relevan untuk sektor formal.

Hipotesis 4: Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap UMK

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PDRB memiliki koefisien positif sebesar 0.0002 namun tidak signifikan dengan nilai probabilitas 0.8640 (> 0.05). Temuan ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan UMK di Sumatera Selatan.

Meskipun secara teoritis PDRB seharusnya memiliki hubungan positif dengan UMK karena mencerminkan kapasitas ekonomi daerah, ketidaksignifikan hasil ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Penelitian di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien yang substansial, namun hubungannya dengan UMK mungkin dimediasi oleh faktor-faktor politik dan kelembagaan dalam penetapan upah minimum (Putri, 2018). Penelitian tentang penyerapan tenaga kerja UKM di

Pulau Sumatera menunjukkan bahwa PDRB memiliki koefisien positif sebesar 2.786400 terhadap penyerapan tenaga kerja namun tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun PDRB mencerminkan output ekonomi, hubungannya dengan kebijakan ketenagakerjaan seperti UMK tidak selalu linear dan dapat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah daerah.

Hipotesis 5: Pengaruh Persentase Penduduk Miskin Terhadap UMK

Hasil pengujian menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMK dengan koefisien -0.0169 dan nilai probabilitas 0.0205 (< 0.05). Temuan ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap penetapan UMK di Sumatera Selatan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian di Sumatera Selatan yang menunjukkan bahwa UMK berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, mengindikasikan hubungan yang kompleks antara kebijakan upah minimum dan pengentasan kemiskinan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dijelaskan oleh PDRB, UMK, dan IPM sebesar 97,69%, dengan PDRB sebagai faktor yang paling signifikan dalam mengurangi kemiskinan (Putri, 2018). Hubungan negatif antara tingkat kemiskinan dan UMK dapat dijelaskan melalui mekanisme ekonomi politik, di mana daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi menghadapi kendala fiskal dan struktural dalam menetapkan UMK yang tinggi. Kondisi kemiskinan yang tinggi juga mencerminkan lemahnya struktur ekonomi dan rendahnya produktivitas tenaga kerja, yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum yang agresif tanpa risiko meningkatkan pengangguran.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menegaskan pentingnya investasi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, karena peningkatan IPM mencerminkan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dapat mendukung upah minimum yang lebih tinggi. Sebaliknya, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Persentase Penduduk Miskin memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap UMK. Temuan ini mencerminkan bahwa daerah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi cenderung menghadapi keterbatasan dalam menetapkan UMK yang lebih tinggi, karena tekanan sosial-ekonomi yang dihadapi serta keterbatasan kapasitas fiskal dan struktural. Sementara itu, variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap UMK.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perumusan kebijakan UMK di Sumatera Selatan. Temuan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap UMK menunjukkan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam penetapan upah minimum untuk menghindari dampak kontraproduktif terhadap ketenagakerjaan. Pengaruh positif signifikan IPM terhadap UMK menegaskan pentingnya investasi dalam pembangunan manusia sebagai prasyarat untuk kebijakan upah minimum yang efektif. Sementara itu, ketidaksignifikan TPAK dan PDRB menunjukkan bahwa penetapan UMK lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik daripada indikator ekonomi makro semata. Temuan ini mendukung pendekatan holistik dalam kebijakan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi lokal, kualitas sumber daya manusia, dan dampak terhadap kesempatan kerja dalam penetapan UMK yang optimal untuk mendorong kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan penciptaan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, G. D., Saleh, R., & Asmara, G. J. (2024). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2015-2020. *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management*, 1(3), 1–11.
<https://economics.pubmedia.id/index.php/aaem>
- Atiyatna, D. P., Muhyiddin, N. T., & Bambang, B. S. (2016). Pengaruh upah minimum, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 8–21.
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/index>
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Damanik, D. C., & Zalukhu, R. S. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UmK) Di Kota Pematangsiantar. *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 2614–7181.
<https://doi.org/10.36985/ekuilmn.v3i1.529>
- Fatmala, D., Catur, R., Dewi, K., & Charima Wardana, A. (2023). Implikasi Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 88c Ayat 1 Dan 2 Tentang Upah Minimum Kabupaten Atau Kota Terhadap Dunia Bisnis. *UNES Law Review*, 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. . UPP STIM YKPN.
- Iswahyudi, B., Effendi, D., Afqah, R., Imawijaya, P., & Puspitasari, D. (2020). Kepastian Hukum Bagi Tenaga Kerja atas Penangguhan Upah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(2), 192–204.
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>
- Jemarut, W., Andriani, I. G. A., & Rizal, P. (2023). Penetapan Upah Minimum Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 133–144.
<https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6457.133-144>
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Maipita, I. (2013). Simulasi Dampak Kenaikan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pendapatan dan Kemiskinan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(3), 391–410.
- Munarni, V., Syarif, M., & Nusantara, A. W. (2024). Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 9(2), 301–312.
- Oktanata, L. (2022). Disparitas Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Selatan Di Tahun Pandemi. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–10.
<https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.310>

- Pusposari, L. F. (2011). Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Dengan Panel Data Analysis. *Jurnal Iqtishoduna* .
<https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.314>
- Putri, L. R. (2018). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Richardson, J. D. (1978). Some Empirical Evidence on Commodity Arbitrage and the Law of One Price. *Journal of International Economics*, 8(2), 341–351.
- Saputri, M. I. (2021). *Analisis Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020*. Universitas Tidar.
- Stigler, G. J. (1946). The Economics of Minimum Wage Legislation. *American Economic Review*, 36(3), 358–365.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. RajaGrafindo Persada.
[//digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3175](http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3175)
- Susanti, E. (2019). *Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2008 - 2017*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Susilowati, L., & Wahyuni, D. (2019). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Bidang Industri Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 15(2), 222. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v15i2.699>
- Trimaya, A. (2014). Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja. *Jurnal Aspirasi*, 5(1).
<http://www.hukumonline.com/>